

daftar pustaka

buku

a. gunawan setiardja, 1990, dialektika hukum dan moral dalam pembangunan masyarakat indonesia, yogyakarta, kanisius.

asshiddiqie, jimly, 2006, *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia*. jakarta: konstitusi press.

asshiddiqie, jimly.2012, pengantar ilmu hukum administrasi negara. jakarta: rajawali pers.

basah, sjachran, 1998, perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi negara. bandung: alumni.

eny kusdarini, 2019, asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara, yogyakarta, uny press.

fajlurrahman jurdi, 2023, pengantar hukum administrasi negara, jakarta, kencana.

faried ali, 2012, hukum tata pemerintahan heteronom dan otonom, refika aditama, bandung,

hadjon, philipus m, 2005, *pengantar hukum administrasi indonesia*. yogyakarta: gadjah mada university press.

hadjon, philipus m, 2015, pengantar hukum administrasi indonesia. yogyakarta: gadjah mada university press.

hakim, lukman, 2019, hukum administrasi keuangan negara. jakarta: sinar grafika.

idup suhady, 2009, pemerintahan yang baik, modul diklat prajabatan gol. i dan ii, lembaga administrasi negara republik indonesia.

indroharto, 1994, asas-asas umum pemerintahan yang baik, bandung, citra aditya bakti.

indroharto. 2018, usaha memahami undang-undang administrasi pemerintahan.
jakarta: rajawali pers.

irwansyah, 2021, *penelitian hukum (pilihan metode dan praktik penulisan artikel)*,
yogyakarta: mitra buana media.

mariam budiardjo, 1998, *dasar-dasar ilmu politik*, jakarta, gramedia pustaka utama.

ridwan hr, 2018, hukum administrasi negara. jakarta: rajagrafindo persada.

ridwan hr. 2014, *hukum administrasi negara*. jakarta: rajawali pers.

sulaksono, 2023, teori-teori hukum administrasi negara, cv jakad media publishing.

suwoto mulyosudarmo, 1990, kekuasaan dan tanggung jawab presiden republik indonesia, surabaya, universitas airlangga.

jurnal

agustin widjiastuti, peran aaupb dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari knk, jurnal perspektif, volume 22. nomor 22 tahun 2017.

fitriyani, I, 2021, "akuntabilitas administrasi pemerintah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur." *jurnal hukum dan kebijakan publik*, vol. 12 no. 2.

simamora, janpata, 2017, "proporsionalitas dalam hukum administrasi." *jurnal ilmu hukum* vol. 12, no. 2.

balai prasarana permukiman wilayah sulawesi selatan. laporan akhir pembangunan pasar tempe kabupaten wajo. makassar: bppw sulsel, 2023.

direktorat jenderal cipta karya. profil balai prasarana permukiman wilayah sulawesi selatan. makassar: ditjen cipta karya, 2023.

kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. jakarta: kementerian pupr, 2020.

lalu dhedi kusmana, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan izin di kabupaten lombok timur, jurnal kajian hukum dan ius vol i. nomor 3 tahun 2013.

rencana strategis kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020–2024. jakarta: kementerian pupr, 2020.

pedoman pengawasan dan pengendalian proyek infrastruktur permukiman. jakarta: direktorat jenderal cipta karya, 2022.

badan pemeriksa keuangan republik indonesia. panduan audit kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. jakarta: bpk ri, 2019.

peraturan perundang-undangan

kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. *peraturan menteri pupr nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis.*

pemerintah republik indonesia. *peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.*

peraturan menteri pupr nomor 3/prt/m/2019 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis kementerian pupr.

peraturan menteri pupr nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman pengawasan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

peraturan presiden republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021.

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

internet

kompas.com, "kpk tetapkan tersangka korupsi pembangunan pasar tempe wajo", diakses 15 juli 2025 dari <https://nasional.kompas.com>.